

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																		
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya melalui tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan kredibel		Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	Rumus / Formulasi Perhitungan: Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan Nilai indeks bisa dibuat dalam skala 0–100, atau dalam kategori seperti: Unggul (91-100) Sangat Baik (80–90,99) Baik (65–79,99) Cukup Baik (50–64,99) Kurang Baik (<50)	Hasil Evaluasi LAN, LAN bertindak sebagai instansi pengampu IKK dan menyediakan pedoman serta dukungan teknis untuk pengukuran	Sekretariat Daerah																		
		Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Nilai	Secara singkat, rumus perhitungan Nilai SAKIP (skala 0-100) adalah penjumlahan dari nilai tertimbang setiap komponennya, sesuai PermenPANRB No. 88 Tahun 2021. Rumusnya adalah: $Nilai\ SAKIP = (N\ PK \times 30\%) + (N\ Peng \times 30\%) + (N\ Pel \times 15\%) + (N\ Ev \times 25\%)$ Di mana: N PK = Nilai Komponen Perencanaan Kinerja N Peng = Nilai Komponen Pengukuran Kinerja N Pel = Nilai Komponen Pelaporan Kinerja N Ev = Nilai Komponen Evaluasi Internal dengan SKOR Predikat: Skor Predikat Keterangan > 90 – 100 AA Sangat Memuaskan > 80 – 90 A Memuaskan > 70 – 80 BB Sangat Baik > 60 – 70 B Baik > 50 – 60 CC Cukup (Memadai) > 30 – 50 C Kurang 0 – 30 D Sangat Kurang	Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB	Sekretariat Daerah																		
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor EKPPD	Skor	Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Skor Kinerja</th> <th>Status Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,00 – 1,80</td> <td>Sangat Rendah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,81 – 2,60</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,61 – 3,40</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,41 – 4,20</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4,21 – 5,00</td> <td>Sangat Tinggi</td> </tr> </tbody> </table>	No	Skor Kinerja	Status Kinerja	1	0,00 – 1,80	Sangat Rendah	2	1,81 – 2,60	Rendah	3	2,61 – 3,40	Sedang	4	3,41 – 4,20	Tinggi	5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Daerah dalam periode tertentu	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
No	Skor Kinerja	Status Kinerja																						
1	0,00 – 1,80	Sangat Rendah																						
2	1,81 – 2,60	Rendah																						
3	2,61 – 3,40	Sedang																						
4	3,41 – 4,20	Tinggi																						
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi																						
Meningkatnya Kualitas Rancangan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)		Indeks Reformasi Hukum	Indeks	Penilaian Indeks Reformasi Hukum 1. Variabel 1 Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi : Bobot 25 2. Variabel 2 Kompetensi aparatur sipil Negara sebagai perancang perundang-undangan yang berkualitas : Bobot 25 3. Variabel 3 Kualitas re-regulasi dan deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu : Bobot 30 4. Variabel 4 Penataan Database Peraturan Perundang-undangan : Bobot 20 Indeks dinyatakan dalam skala 0–100 atau dengan konversi ke kategori dan Predikat IRH : AA (>90 - 100) Istimewa A (>80 - 90) Sangat Baik BB (>70 - 80) Baik B (>60 - 70) Cukup Baik CC (>50 - 60) Cukup C (>30 - 50) Buruk D (0 - 30) Sangat Buruk	Hasil Penilaian Indeks Refomasi Hukum dari Kementerian Hukum Republik Indonesia	Biro Hukum																		
		Nilai Capaian aksi HAM	Nilai	Pelaporan RANHAM capaian penilaian dalam periode B-04, B-08, B.-12 dengan formulasi perhitungan B-04+B-08+B-12 dibagi 3 $\frac{B\ 04 + B\ 08 + B\ 12}{3}$	Hasil Penilaian Aksi HAM dari Kementrian HAM Republik Indonesia	Biro Hukum																		

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Indeks kualitas kebijakan bidang Kesra	Indeks	Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan Nilai indeks bisa dibuat dalam skala 0–100, atau dalam kategori seperti: Unggul (91-100) Sangat Baik (80–90,99) Baik (65–79,99) Cukup Baik (50–64,99) Kurang Baik (<50)	Hasil Evaluasi LAN, LAN bertindak sebagai instansi pengampu IKK dan menyediakan pedoman serta dukungan teknis untuk pengukuran	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatnya Akses dan Capaian Pendidikan Tinggi di Kalangan Penduduk Usia Produktif	Persentase Penduduk Usia >15 Tahun yang sedang menempuh pendidikan tinggi	Persentase	Penduduk >15 tahun yang sedang kuliah : Penduduk >15 tahun x 100%	data resmi dari perguruan tinggi, Dikti, dan data kependudukan	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	Indeks	Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan Nilai indeks bisa dibuat dalam skala 0–100, atau dalam kategori seperti: Unggul (91-100) Sangat Baik (80–90,99) Baik (65–79,99) Cukup Baik (50–64,99) Kurang Baik (<50)	Hasil Evaluasi LAN, LAN bertindak sebagai instansi pengampu IKK dan menyediakan pedoman serta dukungan teknis untuk pengukuran	Biro Perekonomian
	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program unggulan daerah yang sesuai target	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang Sesuai Waktu dan Capaian Fisik}}{\text{Semua program dan kegiatan prioritas}} \times 100\%$ Penilaian Dilakukan Berdasarkan Program Unggulan Gubernur	Realisasi Monitoring aplikasi SIPROMAS	Biro Administrasi Pembangunan
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	Hasil penilaian LKPP atas indikator pemanfaatan sistem pengadaan (SIRUP, e-Katalog, non e-Tendering, eTendering, Toko daring dan e-Kontrak) indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dan indikator tingkat kematangan UKPBJ $= \frac{\text{Skor Capaian dari Seluruh Komponen Penilaian}}{\text{Skor Maksimal Penilaian}} \times 100\%$	Hasil penilaian oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	Sangat Rendah: Skor 11–19 Rendah: Skor 19.1–28 Sedang: Skor 28.1–37 Tinggi: Skor 37.1–46 Sangat Tinggi: Skor 46.1–55 Penilaian dilakukan terhadap 11 variabel utama, yang mencerminkan aspek-aspek penting dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah: 1. Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas 3. Penjaminan Mutu Layanan Daerah 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) 5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur 6. Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas 7. Analisis kebijakan dan menyelesaikan permasalahan. 8. Manajemen Sumber Daya yang Terukur 9. Manajemen Risiko Pelaksanaan Tugas Aparatur 10. Pengukuran Kinerja Daerah 11. Pengembangan Inovasi Layanan 12. Budaya Organisasi	Laporan Indeks Kematangan Organisasi	Biro Organisasi
		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	Jumlah	Angka Absolut = Jumlah Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal A (AA: Nilai 90-100 (Sangat Memuaskan) dan A: Nilai 80-90 (Memuaskan)	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP	Biro Organisasi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kualitas Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Persentase unit layanan yang memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) $\geq 3,0$	Persentase	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah UPP dengan Nilai IPP} \geq 3,0}{\text{Total Jumlah UPP yang Dievaluasi}} \right) \times 100\%$	Rekapitulasi Nilai IPP Seluruh Unit Layanan yang dilakukan oleh Tim Evaluator Pemda yang ditunjuk atau ditetapkan melalui Surat Keputusan	Biro Organisasi
	Meningkatkan Kualitas layanan umum dan rumah tangga Sekretariat Daerah	Indeks kepuasan pengguna layanan umum dan rumah tangga Sekretariat Daerah	Indeks	$\text{IKM} = \left(\frac{\sum(\text{Nilai per unsur})}{\text{Jumlah unsur} \times \text{Jumlah responden}} \right) \times 25$	Laporan SKM Biro Umum	Biro Umum
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	<p>Pergub Kaltim No. 26 Tahun 2022 (yang diubah oleh Pergub 12/2025) inilah yang menjadi dasar hukum dan pedoman teknis bagi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan evaluasi SAKIP internal ke seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Kaltim.</p> <p>Nilai SAKIP=(N PK×30%)+(N Peng ×30%)+(N Pel ×15%)+(N Ev ×25%) Di mana:</p> <p>N PK = Nilai Komponen Perencanaan Kinerja N Peng = Nilai Komponen Pengukuran Kinerja N Pel = Nilai Komponen Pelaporan Kinerja N Ev = Nilai Komponen Evaluasi Internal</p> <p>dengan SKOR Predikat: Skor Predikat Keterangan > 90 – 100 AA Sangat Memuaskan > 80 – 90 A Memuaskan > 70 – 80 BB Sangat Baik > 60 – 70 B Baik > 50 – 60 CC Cukup (Memadai) > 30 – 50 C Kurang 0 – 30 D Sangat Kurang</p>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Biro Administrasi Pimpinan
		Indeks kepuasan Layanan Administrasi Pimpinan	Indeks	$\text{IKM} = \left(\frac{\sum(\text{Nilai per unsur})}{\text{Jumlah unsur} \times \text{Jumlah responden}} \right) \times 25$	Laporan SKM Biro Administasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan